



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GOTRI WIJANTO WURIATMOJO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 415842

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.794.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 2220 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1950 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/70 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/96 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 764 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 76.400.000
7. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 7.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **179.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT USV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **28.459.031**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 25.000.000

Sub Total

Rp. 2.027.659.031

III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.877.659.031

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.